

KAJIAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2013

Siswanto

Kepala Bagian Pembangunan
Setda Kabupaten Grobogan

Abstract

There is still encountered misalignment between Renja SKPD and Renstra SKPD, signed by a new activity in Renja SKPD beyond Renstra SKPD, in other words, a new activity appeared after the Renstra is set.

There is still encountered misalignment between planning (RKPD) and budgeting (APBD) documents, found several activities in APBD that are not listed in RKPD. Monitoring should be carried out intensively in the process of Renja SKPD drafting and RKPD to fit the legislation in force and in accordance with the relevant planning documents.

Keywords: *misalignment, monitoring, related planning*

Abstrak

Masih ditemui ketidakselarasan antara Renja SKPD dengan Renstra SKPD, ditandai ada kegiatan baru dalam Renja SKPD yang diluar Renstra SKPD, dengan kata lain muncul kegiatan baru setelah Renstra ditetapkan.

Masih ditemui ketidakselarasan antara dokumen perencanaan (RKPD) dengan dokumen penganggaran (APBD), ditemui beberapa kegiatan dalam APBD yang tidak tercantum dalam RKPD. Perlu dilaksanakan monitoring secara intensif dalam proses penyusunan Renja SKPD dan RKPD agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan dokumen perencanaan terkait.

Kata kunci: ketidakselarasan, monitoring, perencanaan terkait

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan secara umum melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan pembangunan, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan. Ketiga tahapan tersebut memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan yang dilaksanakan. Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Proses pelaksanaan pembangunan daerah melibatkan pemerintah daerah, badan hukum swasta, dan masyarakat sebagai pelaku pembangunan daerah. Evaluasi pembangunan diperlukan untuk mengetahui kemajuan, pencapaian hasil dan kendala yang dijumpai

dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat dijadikan untuk perbaikan rencana pembangunan pada masa mendatang.

Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Diamanatkan bahwa Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, meliputi evaluasi terhadap: (1) kebijakan perencanaan pembangunan daerah; (2) pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan (3) hasil rencana pembangunan daerah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah oleh Bupati/Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah, dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya. Evaluasi oleh Bappeda meliputi: (1) penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan (2) menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan dilakukan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; keselarasan antar dokumen perencanaan; dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan mencakup pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sementara itu evaluasi terhadap hasil pembangunan mencakup capaian berbagai target indikator yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013, dalam lampiran II disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2013. Dengan demikian seluruh pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melakukan evaluasi RKPD tahun 2013 sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, sekaligus untuk mengetahui seberapa jauh capaian target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2013, dan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan tahun berikutnya, maka perlu dilakukan evaluasi RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2013.

2. Maksud

Maksud kegiatan Evaluasi RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2013 adalah untuk menilai dan mengevaluasi terhadap pencapaian target-target rencana program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2013 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013.

3. Tujuan

Adapun tujuan kegiatan Evaluasi RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2013 adalah:

- a. Memberikan gambaran realisasi capaian kinerja rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang telah ditargetkan dalam RKPD Tahun 2013;
- b. Memberikan gambaran realisasi penyerapan dana kegiatan yang dilaksanakan SKPD yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2013;
- c. Mengetahui hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar perumusan rekomendasi dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2015.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Evaluasi RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2013 adalah:

- a. Melakukan sosialisasi kepada SKPD mengenai evaluasi RKPD tahun 2013;
- b. Melakukan pengolahan data evaluasi RKPD tahun 2013;
- c. Melakukan penilaian terhadap kinerja kegiatan yang meliputi pencapaian target kinerja RKPD tahun 2013 dan realisasi anggaran kegiatan APBD tahun 2013;
- d. Merumuskan rekomendasi hasil evaluasi RKPD tahun 2013.

5. Metode Evaluasi RKPD

Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data : Data yang digunakan dalam evaluasi hasil RKPD adalah data primer yang berasal dari isian formulir evaluasi hasil RKPD tahun 2013 per triwulan oleh masing-masing SKPD.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengelompokan data dalam evaluasi hasil RKPD tahun 2013 dilakukan per urusan pembangunan daerah, yang mencakup sebanyak 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Teknik penilaian kinerja atas indikator kinerja kegiatan pembangunan daerah dalam evaluasi hasil RKPD ini dilakukan dengan menghitung persentase antara capaian kinerja per triwulan dengan target kinerja dalam RKPD/Renja SKPD. Kinerja anggaran diukur dengan menghitung persentase antara target yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasi keuangan per triwulan.

Teknik analisis yang digunakan dalam evaluasi RKPD tahun 2013 ini adalah analisis perbandingan, yaitu membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Analisis perbandingan juga

dilakukan untuk mengetahui keselarasan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada APBD tahun 2013 dengan rencana awal yang tercantum dalam dokumen RKPD tahun 2013. Rata-rata persentase capaian kinerja masing-masing urusan pembangunan daerah akan dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1.
Kriteria Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2013

No	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Interval Nilai Realisasi Kinerja 1 Tahun (Permendagri 32/2012)	Interval Nilai Realisasi Kinerja s/d Triwulan III
1	Sangat Tinggi	ST	91% - 100%	66% - 75%
2	Tinggi	T	76% - 90%	56% - 65%
3	Sedang	S	66% - 75%	46% - 55%
4	Rendah	R	51% - 65%	37% - 45%
5	Sangat Rendah	SR	< 50%	< 36%

7. Visi dan Misi

a. Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Kabupaten Grobogan pada saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2005 - 2025 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2013, maka untuk pembangunan Kabupaten Grobogan pada periode lima tahun ke depan (tahun 2011 - 2016), disusun visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Grobogan sebagai Daerah Industri dan Perdagangan yang Berbasis Pertanian, untuk Mencapai Masyarakat yang Sehat, Cerdas dan Lebih Sejahtera”

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah:

- a) Memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah, seperti jalan, jembatan, pengairan, pusat-pusat perdagangan dan perindustrian rakyat, pusat-pusat pendidikan, dan pusat-pusat pembinaan kesehatan serta infrastruktur strategis lainnya;
- b) Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik;
- c) Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja secara lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang;

- d) Memantapkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata;
- e) Memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat;
- f) Memantapkan upaya pelestarian sumberdaya alam dan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

8. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

- 1) **Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang mendukung Perekonomian Daerah**, antara lain: a) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan/Jembatan; b) Program Pengembangan, Pemeliharaan Sarana Prasarana Jaringan Irigasi; c) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku; d) Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan; e) Program Pengembangan, Pemeliharaan dan Konservasi Sumberdaya Air; f) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keciptakarya; dan g) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perdagangan Rakyat.
- 2) **Pengembangan Pendidikan Bermutu dan Terjangkau sampai Tingkat SLTA**, antara lain: a) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); b) Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; c) Program Pendidikan Menengah; d) Program Peningkatan Pendidikan Non Formal dan Luar Biasa; e) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; f) Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga; g) Program Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan; dan h) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan.
- 3) **Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat**, antara lain: a) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; b) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; c) Program Perbaikan Gizi Masyarakat; d) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; e) Program Peningkatan Penyuluhan dan Promosi Kesehatan Masyarakat; f) Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; dan g) Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Tenaga Kesehatan.
- 4) **Pemantapan Pembangunan Ekonomi dengan Mendorong Semakin Tumbuh dan Berkembangnya Pembangunan di Bidang Pertanian dalam Arti Luas**, antara lain: a) Program Peningkatan Penyediaan Sarana Prasarana Produksi Pertanian dalam Arti Luas; b) Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan; c) Program

Pencegahan dan Penanggulangan Hama dan Penyakit secara Terpadu; d) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dalam Arti Luas; e) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Produktivitas serta Pembukaan Lapangan Kerja; f) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; g) Program Peningkatan Ketrampilan dan Pembinaan Pelaku Usaha Industri Perdagangan dan Pariwisata; h) Program Peningkatan Promosi Produksi Industri, Perdagangan dan Pariwisata; i) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian dalam Arti Luas; j) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata; dan k) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

- 5) **Pemantapan Upaya Penciptaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**, antara lain: a) Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Kapasitas Aparatur; b) Program Penataan Administrasi Kependudukan; c) Program Pelayanan Keluarga Berencana; d) Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya; e) Program Peningkatan Politik Masyarakat; f) Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah; g) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah; h) Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah; dan i) Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.
- 6) **Pemantapan Upaya Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, antara lain: a) Program Pengelolaan Persampahan; b) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan; dan c) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam.

HASIL EVALUASI RKPD TAHUN 2013

1. Prestasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013

Sampai dengan triwulan ke-3 rata-rata realisasi kinerja kegiatan masih mencapai 42,26% (kategori sedang), dan realisasi anggaran baru mencapai 47,95% (kategori sedang), dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.

Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD per Urusan s/d Tri Wulan III

Urusan/Program	% Realisasi Kinerja	% Realisasi Anggaran
Kesehatan		
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	75,00	10,22
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	79,71	57,96
Program Pengawasan Obat dan Makanan	75,00	82,40
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	80,00	72,80
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	75,00	45,65
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	77,50	69,88
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	75,00	39,28
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	75,00	66,60
Pekerjaan Umum		
Program Pengaturan Jasa Konstruksi	100,00	82,68

Lanjutan Tabel 2.

Urusan/Program	% Realisasi Kinerja	% Realisasi Anggaran
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	71,88	30,83
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya	68,38	26,47
Program Pengendalian Banjir	59,26	26,06
Perhubungan		
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	75,00	77,64
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ	33,33	49,18
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	38,63	57,09
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	22,50	54,73
Lingkungan Hidup		
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	0,00	38,07
Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup	32,81	58,15
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	12,50	10,33
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam	0,00	58,07
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	75,00	54,16
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	55,00	55,00
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6,82	48,62
Kependudukan dan Catatan Sipil		
Program Penataan Administrasi Kependudukan	55,77	62,39
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Berencana		
Keluarga		
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	75,00	47,52
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak	75,00	58,69
Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	75,00	56,67
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesertaan Gender Dalam Pembangunan	75,00	48,18
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		
Program Keluarga Berencana	75,00	99,46
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	75,00	100,00
Program Pelayanan Kontrasepsi	66,67	47,48
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	75,00	100,00
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	75,00	84,42
Program Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu - PADU	75,00	91,05
Penanaman Modal		
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	0,00	68,24
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana & Prasarana Daerah	0,00	0,00
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	0,00	0,00
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	0,00	33,20
Kebudayaan		
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	48,21	61,04

Lanjutan Tabel 2.

Urusan/Program	% Realisasi Kinerja	% Realisasi Anggaran
Pemuda dan Olahraga		
Program Pengembangan dan Keserasian Kepemudaan	12,50	50,00
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	55,56	56,64
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	57,81	98,12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	88,89	83,53
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	66,67	66,52
Program Pendidikan Politik Masyarakat	71,43	57,72
Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan	70,31	68,19
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	63,64	77,25
Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
Perangkat		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70,40	64,68
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	62,40	89,87
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	71,88	95,96
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	69,93	70,81
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	69,58	69,58
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	30,00	121,86
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Daerah	49,34	49,82
Program Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah	52,32	59,49
Program Penatalaksanaan Pemerintah Daerah	48,22	48,22
Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	0,00	0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelayanan Capaian Kinerja dan Keuangan	88,57	56,59
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	43,61	43,36
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	50,00	48,17
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	69,03	51,76
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	0,00	75,67
Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuda	65,90	62,14
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	33,33	71,80
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	0,00	57,23
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	16,67	57,77
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	0,00	80,65
Program Pengembangan Data	0,00	52,11
Program Pengentasan Kemiskinan	75,00	85,19
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	50,94	74,87

Lanjutan Tabel 2.

Urusan/Program	% Realisasi Kinerja	% Realisasi Anggaran
Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	15,83	46,21
Komunikasi dan Informatika		
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	37,03	46,84
Program Peningkatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	50,00	61,16
Pertanian		
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	50,00	49,97
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	0,00	7,94
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	20,00	11,64
Kehutanan		
Program Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Alam	12,50	17,77
Program Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (RHL)	0,00	13,44
Program Perlindungan Kawasan Konservasi	0,00	4,47
Peningkatan Pelaksanaan Reboisasi	50,00	51,04
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	0,00	0,00
Energi dan Sumber Daya Mineral		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan	66,67	62,93
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	0,00	0,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	0,00	0,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Air Tanah	50,00	50,00
Program Pengembangan dan Pembinaan Migas	0,00	0,00
Program Pengelolaan dan Pengembangan Potensi dan Teknologi Geologi	0,00	0,00
Program Peningkatan Pelayanan Usaha Pertambangan	0,00	0,00
Pariwisata		
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	43,33	98,66
Program Pengembangan Kemitraan	52,50	41,25
Perdagangan		
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	0,00	31,23
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	0,00	0,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	100,00	96,15
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	27,68	31,02
Program Pembinaan dan Pengawasan Pendirian Pasar/Toko Modern	0,00	0,00
Program Pelayanan Perdagangan Berjangka Komoditi	0,00	0,00
Program Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar	56,25	49,70
Industri		
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	0,00	0,00
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	23,57	23,69
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	0,00	0,00
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	0,00	0,00
Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia	0,00	0,00
Program Pengembangan Industri Tekstil Produk Tekstil	100,00	100,00
Rata-rata	42,26	47,95

2. Analisis Keselarasan Program dan Kegiatan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Keselarasn program dan kegiatan antar dokumen perencanaan dan penganggaran masih menjadi permasalahan klasik yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Pemahaman dan kesadaran seluruh aparat di SKPD bahwa keselarasn program dan kegiatan merupakan hal yang wajib terpenuhi ternyata belum terlaksana dengan baik. Ketidakselarasan antar dokumen perencanaan terlihat dari adanya kecenderungan beberapa kegiatan tambahan dalam APBD yang tidak terdapat dalam renja SKPD, maupun renstra SKPD. Ketidakmatangan dalam proses penyusunan RKPD menjadikan pada saat pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD memunculkan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam RKPD. Dalam kaitannya dengan Renstra SKPD, terdapat beberapa kegiatan APBD yang tiba-tiba muncul setelah beberapa tahun renstra SKPD berjalan.

3. Analisis Prestasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013

a. Kesehatan

Rata-rata realisasi kinerja kegiatan sampai dengan tri wulan III pada urusan Kesehatan sudah mencapai 76,53% dan realisasi anggaran sudah mencapai 55,60%.

Tabel 3.

Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d Tri Wulan III
Urusan Kesehatan

No.	Program/Kegiatan	Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi 2013 (%)	
		K	R
1.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	75,00	10,22
2.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	79,71	57,96
3.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	75,00	82,40
4.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	80,00	72,80
5.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	75,00	45,65
6.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	77,50	69,88
7.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	75,00	39,28
8.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	75,00	66,60
Rata-rata		76,53	55,60

b. Pekerjaan Umum

Rata-rata realisasi kinerja kegiatan sampai dengan tri wulan III pada urusan Pekerjaan Umum sangat rendah, yaitu baru mencapai 74,88%, dan realisasi anggaran sudah tercapai yaitu mencapai 41,51%.

Tabel 4.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d Tri Wulan III
Urusan Pekerjaan Umum

No.	Program/Kegiatan	Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi 2013 (%)	
		K	R
1.	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	100,00	82,68
2.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	71,88	30,83
3.	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	68,38	26,47
4.	Program Pengendalian Banjir	59,26	26,06
Rata-rata		74,88	41,51

c. Perhubungan

Rata-rata realisasi kinerja kegiatan sampai dengan tri wulan III pada urusan Perhubungan baru mencapai 42,36%, dan realisasi anggaran baru mencapai 59,66 %.

Tabel 5.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d Tri Wulan III
Urusan Perhubungan

No.	Program/Kegiatan	Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi 2013 (%)	
		K	R
1.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	75,00	77,64
2.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	33,33	49,18
3.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	38,63	57,09
4.	Program Pengendalian & Pengamanan Lalu Lintas	22,50	54,73
Rata-rata		42,36	59,66

d. Lingkungan Hidup

Rata-rata realisasi kinerja kegiatan sampai dengan tri wulan III pada urusan Lingkungan Hidup baru mencapai 26,02%, dan realisasi anggaran baru mencapai 46,06%.

Tabel 6.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d Tri Wulan III
Urusan Lingkungan Hidup

No.	Program/Kegiatan	Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi 2013 (%)	
		K	R
1.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	0,00	38,07
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	32,81	58,15

No.	Program/Kegiatan	Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi 2013 (%)	
		K	R
3.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	12,50	10,33
4.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	0,00	58,07
5.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	75,00	54,16
6.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	55,00	55,00
7.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6,82	48,62
Rata-rata		26,02	46,06

e. Kependudukan dan Catatan Sipil

Rata-rata realisasi kinerja kegiatan sampai dengan tri wulan III pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil baru mencapai 55,77%, dan realisasi anggaran sudah mencapai 62,39%.

Tabel 7.

Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d Tri Wulan III
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	Program/Kegiatan	Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi 2013 (%)	
		K	R
1.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	55,77	62,39

f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rata-rata realisasi kinerja kegiatan sampai dengan triwulan III pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mencapai 75,00%, dan realisasi anggaran baru mencapai 52,77%.

Tabel 8.

Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d Tri Wulan III
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Program/Kegiatan	Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi 2013 (%)	
		K	R
1.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	75,00	47,52
2.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	75,00	58,69
3.	Program Penguatan Kelembagaan PUG & Anak	75,00	56,67
4.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesertaan Gender Dalam Pembangunan	75,00	48,18
Rata-rata		75,00	52,77

g. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Rata-rata realisasi kinerja kegiatan sampai dengan tri wulan III pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera baru mencapai 75,00%, dan realisasi anggaran baru mencapai 99,46%.

Tabel 9.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d Tri Wulan III
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No.	Program/Kegiatan	Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi 2013 (%)	
		K	R
1.	Program Keluarga Berencana	75,00	99,46
2.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	75,00	100,00
3.	Program Pelayanan Kontrasepsi	66,67	47,48
4.	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	75,00	100,00
5.	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	75,00	84,42
6.	Program Pengembangan Model Operasional BKB – Posyandu – PADU	75,00	91,05
Rata-rata		75,00	99,46

h. Penanaman Modal

Rata-rata realisasi kinerja kegiatan sampai dengan tri wulan III pada urusan Penanaman Modal baru mencapai 0%, dan realisasi anggaran baru mencapai 25,36%.

Tabel 10.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d Tri Wulan III
Urusan Penanaman Modal

No.	Program/Kegiatan	Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi 2013 (%)	
		K	R
1.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	0,00	68,24
2.	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah	0,00	0,00
3.	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	0,00	0,00
4.	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	0,00	33,20
Rata-rata		0,00	25,36

i. Kebudayaan

Rata-rata realisasi kinerja kegiatan sampai dengan tri wulan III pada urusan Kebudayaan sudah mencapai 48,21%, dan realisasi anggaran baru mencapai 61,04%.

Tabel 11.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d Tri Wulan III
Urusan Kebudayaan

No.	Program/Kegiatan	Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi 2013 (%)	
		K	R
1.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	48,21	61,04

j. Kepemudaan dan Olahraga

Rata-rata realisasi kinerja kegiatan sampai dengan tri wulan III pada urusan Kepemudaan dan Olahraga baru mencapai 53,69%, dan realisasi anggaran baru mencapai 72,07%.

Tabel 12.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d Tri Wulan III
Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No.	Program/Kegiatan	Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi 2013 (%)	
		K	R
1.	Program Pengembangan & Keserasian Kepemudaan	12,50	50,00
2.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	55,56	56,64
3.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	57,81	98,12
4.	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Olahraga	88,89	83,53
Rata-rata		53,69	72,07

k. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Rata-rata realisasi kinerja kegiatan sampai dengan tri wulan III pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri baru mencapai 68,01% (tinggi), dan realisasi anggaran baru mencapai 67,42%.

Tabel 13.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD s/d Tri Wulan III
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No.	Program/Kegiatan	Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi 2013 (%)	
		K	R
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	66,67	66,52
2.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	71,43	57,72
3.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	70,31	68,19
4.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	63,64	77,25
Rata-rata		68,01	67,42

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil evaluasi RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- a) Masih ditemui ketidakselarasan antara Renja SKPD dengan Renstra SKPD, ditandai ada kegiatan baru dalam Renja SKPD yang di luar Renstra SKPD, dengan kata lain muncul kegiatan baru setelah Renstra ditetapkan.
- b) Masih ditemui ketidakselarasan antara dokumen perencanaan (RKPD) dengan dokumen penganggaran (APBD), ditemui beberapa kegiatan dalam APBD yang tidak tercantum dalam RKPD.

2. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil evaluasi RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- a) Dalam rangka meningkatkan keselarasan program dan kegiatan antara APBD dengan RKPD maka penyusunan KUA-PPAS, dan RAPBD perlu memperhatikan Renja SKPD dan RKPD.
- b) Perlu dilaksanakan monitoring secara intensif dalam proses penyusunan Renja SKPD dan RKPD agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan dokumen perencanaan terkait.
- c) Perlu dilakukan pengendalian secara intensif dalam penyusunan KUA-PPAS sehingga selaras dengan RKPD.

Daftar Pustaka

- Bappeda, 2011, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan*.
- _____, 2005, *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Grobogan*.
- _____, 2013, *Penyusunan Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan*.
- _____, 2013, *Penyusunan Evaluasi RKPD Kabupaten Grobogan*.
- BPS, 2013, *Grobogan Dalam Angka*, Kabupaten Grobogan.
- Charles and Jones, 1975, *Evaluation and Social Change*. Chalenger, Amerika.
- Cernea dan Tapping, 1977, *Sistem Perencanaan Pembangunan*, Kertas Kerja Lokakarya di Depdagri Jakarta.
- Inayatullah, 1980, *Sistem Perencanaan Pembangunan*, LPPM UGM Yogyakarta.
- Nasikun, 2006, *Sistem Evaluasi Pembangunan*, PAU UGM, Kertas Kerja Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, *Pemerintah Daerah*, Depdagri.
- Sutopo, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press Solo.

